



POLITIK IDENTITAS AGAMA SEBAGAI TANTANGAN PELAKSANAAN PESTA DEMOKRASI DI INDONESIA TAHUN 2024: STUDI KASUS PILKADA DKI JAKARTA 2017 & PILPRES 2019

Alhidayath Parinduri*, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Pujiati, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

This article aims to analyze and examine the influence of religious identity on political events within the Democratic Party in Indonesia. Indonesia, a nation that officially recognizes six religions and various belief systems, provides a unique backdrop for this analysis. Employing a qualitative research method with a descriptive approach, the study reveals that politics is intricately intertwined with human existence, particularly in the context of selecting leaders at the national, provincial, and local levels. While politics ideally serves the noble purpose of fostering prosperity, it can deviate when specific identities, such as religious affiliations, are exploited to mobilize voters solely based on their identity. This often leads to divisions within the nation. This article delves into the role of political identity in securing victory for a particular party, shedding light on the challenges and complexities associated with this dynamic.

ARTICLE HISTORY

Received 25/07/2023
Revised 22/08/2023
Accepted 21/09/2023
Published 23/09/2023

KEYWORDS

Indonesian; political identity; religions.

CITATION (APA 6th Edition)

Parinduri, A., & Pujiati. (2023). Politik Identitas Agama sebagai Tantangan Pelaksanaan Pesta Demokrasi di Indonesia Tahun 2024: Studi Kasus Pilkada DKI Jakarta 2017 & Pilpres 2019. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 476-484.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ dayathparinduri09@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v7i2.7551>

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang multikulturalisme dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Hal itu dapat dilihat dari beragamnya agama, suku, kulit, maupun aktivitas masyarakatnya. Salah satunya, kita lihat dari agama, Indonesia memiliki enam agama resmi yang diakui oleh pemerintah yakni Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu (Ufie, 2014). Keadaan ini pada dasarnya memberi banyak dampak positif bagi kehidupan, karena kita dapat mengenal keragaman ataupun sesuatu yang berbeda dari kita. Serta dapat juga meningkatkan semangat persatuan antar sesama anak bangsa (Ma'arif, 2012). Akan tetapi, jika perbedaan tersebut tidak disikapi dengan cermat maka muncul masalah lain yakni konflik, cekcok, maupun intoleransi beragama.

Jika kita lihat ke belakang, dahulu para pendiri bangsa bersusah payah memperjuangkan toleransi dan kerukunan umat beragama. Hal itu dapat kita lihat pada pengubahan bunyi sila pertama Pancasila yang sekarang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama itu sangatlah jelas maknanya bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada Ketuhanan dan menjunjung tinggi toleransi antar pemeluk agama (Siswanto, 2019). Namun, apa yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa seolah diabaikan oleh anak bangsa dewasa ini.

Akhir-akhir ini kasus intoleransi beragama kembali marak di berbagai wilayah di Indonesia, misalnya pada bulan Mei yang lalu terjadi pembubaran ibadah yang dilakukan masyarakat kepada jemaat Gereja Mawar Sharon (GMS) di Binjai. Kemudian, terjadi juga pembakaran Balai Pengajian milik Muhammadiyah di Bireuen. Isu ini pun dimanfaatkan untuk menyebarkan politik identitas agama oleh segelintir oknum. Sungguh intoleransi menjadi ancaman serius bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam *Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of*



Discrimination Based on Religion of Belief, disebutkan bahwa intoleransi pada agama diartikan sebagai pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan. Selain itu, intoleransi dapat disebut juga meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar yang setara (Ardini, 2021).

Faktanya, intoleransi beragama bukan menjadi suatu hal yang baru di Indonesia pada masa-masa sebelumnya kasus-kasus bernada SARA telah terjadi, misalnya konflik agama di Poso pada tahun 1992, konflik Sunni dan Syiah di Jawa Timur pada 2006, maupun konflik agama di Bogor karena Pembangunan GKI Yasmin sejak tahun 2000-2008 (Firdaus & Andriyani, 2021; Yunus, 2014). Selain itu, kasus yang paling menghebohkan yakni penggunaan politik identitas agama pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dan Pilpres (Pemilihan Presiden) tahun 2019.

Beberapa contoh tersebut mencerminkan betapa lunturnya pemahaman masyarakat akan pentingnya toleransi dan penerapan Pancasila dalam kehidupan. Mengapa demikian? Kita ketahui bahwasanya dalam Pancasila terdapat nilai-nilai toleransi yang termaktub dalam Sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila ketiga Persatuan Indonesia. Kedua sila tersebut dimaknai pentingnya menghargai agama dan pelaksanaan peribadatan yang dilakukan sesama warga negara Indonesia. Selain itu, makna Persatuan Indonesia sudah tentu dimaksudkan perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu bukan menjadikan sesama anak bangsa terpecah belah, melainkan perbedaan yang semakin menguatkan persatuan antar sesama anak bangsa (Heller, 2001a, 2001b).

Untuk melihat gap penelitian ini dengan penelitian lainnya, berikut penulis sajikan beberapa kajian terdahulu, yaitu: (1) Tayob, dalam penelitiannya menggali pengaruh politik identitas agama terhadap dinamika demokrasi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor identitas agama dapat memengaruhi pemilihan politik, pengambilan keputusan, dan perilaku politik masyarakat. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan penting tentang dampak politik identitas agama di Indonesia, belum ada fokus yang cukup pada tantangan konkret yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pesta demokrasi di masa mendatang, khususnya Pemilu 2024 (Tayob, 2002); (2) Lawrence dalam penelitiannya mengeksplorasi peran identitas agama dalam pemilihan umum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agama sering digunakan sebagai faktor penentu dalam pemilihan politik. Penelitian ini lebih fokus pada hubungan antara agama dan pemilihan umum. Namun, gap penelitian yang terlihat adalah kurangnya analisis mendalam tentang bagaimana identitas agama dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi secara umum, terutama dalam konteks Pemilu 2024 (Lawrence, 2009); (3) Hanan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa politik identitas meningkat dan berperan secara signifikan selama pemilu ini, termasuk melalui penggunaan berita palsu. Namun dampak politik identitas dibatasi oleh faktor fundamental (seperti penilaian masyarakat terhadap petahana), sehingga gagal menjadi faktor penentu dalam pemilihan presiden. Yang penting, sifat persaingan yang multipolar dalam pemilu legislatif membuat politik identitas sulit memberikan dampak yang menentukan (Hanan, 2020).

Isu ini pun semakin kencang beredar di masyarakat. Terlebih dengan kecanggihan teknologi saat ini membuat semua informasi tentang intoleransi akan cepat diterima masyarakat. Mengutip dari penelitian Lina Herlina disebutkan bahwa maraknya ujaran kebencian yang ada di media sosial ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap sikap intoleran di masyarakat. Ujaran kebencian, membuat masyarakat terkotak-kotak dalam kubu-kubu tertentu. Hujatan dan ujaran kebencian bahkan mengerucut pada *labeling* istilah tertentu dalam media sosial. Hujatan dengan istilah-istilah tersebut sebagian besar merujuk pada penyudutan kelompok khususnya pada kelompok keagamaan, bukan pada perseorangan (Herlina, 2018).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Inilah yang kemudian membuat penelitian kualitatif disebut juga *naturalistic inquiry* atau *field study* (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui sumber-sumber berupa buku, jurnal, dan data-data dari website kredibel. Selanjutnya, penulis melakukan pengolahan data-data tersebut dan kemudian mendeskripsikan menjadi fakta untuk dituliskan dalam penelitian ini. Teknik tersebut termasuk dalam kategori studi literatur atau studi dokumen.

Studi dokumen merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya (Zed, 2014). Data-datanya berupa catatan yang terpublikasikan, buku teks, artikel jurnal, maupun website-website resmi, dan sejenisnya. Penelitian jenis ini bisa juga untuk menggali pikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasikan. Objek penelitian ini berfokus pada peristiwa politik identitas yang terjadi di Indonesia dalam konteks Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2019. Adapun data yang dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan peristiwa politik identitas yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2017-2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Munculnya Politik Identitas di Indonesia

Secara historis, fenomena politik identitas muncul pertama kali sekitaran tahun 1970an di Amerika. Saat itu, politik identitas muncul akibat adanya masalah gender, entitas, feminisme, ras dan masyarakat-masyarakat yang merasa termarginalkan (Rahman, 2020). Namun, satu hal yang menarik ialah sampai hari ini belum ditemukan siapa sebenarnya yang pertama kali mencetuskan istilah politik identitas ini. Dapat dikatakan istilah ini muncul begitu saja dan terus menyebar ke berbagai belahan dunia. Pada perjalanannya, politik identitas pun semakin berkembang dan memasuki ranah yang lebih luas, seperti suku, agama, dan ras (Fatianda, 2023).

Sebenarnya, kemunculan narasi tentang politik identitas di Indonesia telah ada sejak masa-masa Orde Baru. Namun, saat itu karena keterbatasan akses maka masyarakat tidak terlalu familiar dengan istilah demikian. Barulah dalam satu dekade ke belakang, istilah politik identitas mulai familiar di kalangan masyarakat umum. Hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan mudahnya mengakses berbagi informasi dari mana pun. Fenomena politik identitas yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini sangat erat kaitannya dengan etnis, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakilkan kepada para elite yang memiliki kepentingan politik terkhusus kepentingan pada pemilu.

Kemunculan politik identitas dalam setiap momen pertarungan politik mencerminkan belum tercapainya transformasi masyarakat menuju masyarakat yang demokratis dan belum terciptanya demokrasi yang terarah. Keberlangsungan politik identitas yang saat ini tampaknya semakin menjadi-jadi diakibatkan oleh demokrasi yang berjalan masih bersifat “eksklusif” dan “transaksional”, belum “transformasional”. Selain itu, disebabkan juga oleh media sebagai aktor politik yang terkadang menyebarkan berita-berita sentimen, bisnis konsultan dan *buzzer* yang kian merajalela, literasi media sosial yang rendah dibarengi tingkat pendidikan yang rendah sehingga mudah terpengaruh akan informasi yang belum tentu kebenarannya. Kemudian, kurangnya kesadaran bela negara yang menyebabkan seseorang hanya memikirkan kepentingan pribadi, serta yang paling krusial ialah penegakan hukum yang saat ini masih lemah.

Dalam politik identitas, biasanya para pelaku menggunakan teknik ujaran kebencian terhadap kelompok lawannya. Teknik tersebut secara strategis memainkan hasutan dan keterhasutan yang

dapat mengeksploitasi kebebasan dalam demokrasi dengan memperkuat identitas-identitas kelompok sebagai sumber daya dalam aksi-aksi kolektif (George, [2017](#)). Secara umum, praktik politik identitas muncul pada tahun-tahun politik, baik pada tingkat pemilihan kepala daerah bahkan pemilihan presiden. Permasalahan yang muncul, ketika praktik politik identitas dalam pemilu di Indonesia dapat mempengaruhi ketahanan nasional, karena berpotensi mengarah pada dampak yang berlawanan dengan tujuan demokrasi dan menjurus pada perpecahan. Hal ini bisa saja menyebabkan instabilitas politik dan disintegrasi bangsa Indonesia (Wingarta, Helmy, Hartono, Mertadana, & Wicaksono, [2022](#)).

Politik Identitas Agama di Indonesia

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam, sebanyak 20,4 juta jiwa (7,49%) beragama Kristen, 8,42 juta jiwa (3,09%) beragama Katolik, 4,67 juta atau 1,71% beragama Hindu, 2,04 juta jiwa atau 0,75% beragama Buddha, 73,02 ribu jiwa (0,03%) beragama Konghucu, dan 102,51 ribu jiwa (0,04%) penduduk Indonesia yang menganut aliran kepercayaan. Provinsi dengan penduduk muslim terbesar di Indonesia adalah Jawa Barat, yakni sebanyak 46,3 juta jiwa atau 97,29% dari total populasi. Kemudian, Jawa Timur dengan penduduk yang beragama Islam 39,85 juta jiwa atau 97,21% dari total populasi. Berikutnya, Jawa Tengah dengan penduduk muslim mencapai 36,21 juta jiwa atau 97,26% dari total populasi.

Data tersebut memperlihatkan potensi yang sangat besar bagi para politikus untuk mendapatkan suara dari kalangan pemilih agama Islam. Inilah yang selanjutnya, dimanfaatkan oleh para wirausahawan politik untuk memuluskan langkahnya mendapatkan satu kekuasaan politik. Oleh karena itu di Indonesia, politik identitas agama dianggap sebagai yang paling jitu untuk memuluskan kepentingan politik. Rahman menyebut, agama sebagai panglima dari politik saat ini, tak jarang setiap gerakan massa selalu dipenuhi oleh simbol-simbol agama tertentu.

Sentimen keagamaan menjadi isu yang sensitif dalam ranah politik di Indonesia saat ini, sehingga respons dari masyarakat pun sangat cepat pergerakannya. Isu-isu keadilan serta penistaan agama selalu diangkat ke permukaan sebagai umpan agar massa menarik setiap entitas-entitas yang mempunyai kesamaan. Politik identitas memang terbukti jitu jika digunakan untuk kepentingan meraih kekuasaan, apalagi dengan mengatasnamakan agama. Akan tetapi, hal tersebut perlu kendali yang ketat supaya tidak berakibat buruk pada kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia (Rahman, [2020](#)).

Berdasarkan catatan sejarah perjalanan bangsa, sejak dahulu peran Islam dalam politik Indonesia lebih adem dibandingkan dengan misalnya Iran atau Mesir. Para pengamat menyatakan bahwa Indonesia adalah contoh positif yang mengonter klaim-klaim serampangan tentang ketidakcocokan Islam dengan demokrasi sekuler (George, [2017](#)). Hal tersebut, dikarenakan budaya merupakan faktor yang mampu menyatukan Islam dan Politik di Indonesia. Islam Indonesia tidak pernah bersekutu dengan suatu kerajaan yang mampu memaksakan satu kepercayaan yang baku.

Namun, pasca keruntuhan Soeharto berbagai kelompok garis keras berebut pengaruh melalui ruang publik Islam. Tapi, mereka harus bersaing dengan kelompok lain, seperti kelompok "Islam Sosial". Islam Sosial atau oleh Hefner disebut *Civil Islam* merupakan kelompok yang menolak gambaran keliru mengenai negara Islam dan menafikan peran agama dalam persoalan publik (Muhajir & Wulandari, [2023](#)). Berbagai usaha dilakukan agar dapat merebut suara-suara Islam melalui sentimen keagamaan. Menguatnya isu politik identitas di ranah lokal bersamaan dengan politik desentralisasi (pelimpahan kekuasaan kepada daerah), tepatnya pasca pemberlakuan UU No. 22/1999, gerakan politik identitas semakin jelas wujudnya. Bahkan, banyak aktor politik lokal maupun nasional

secara sadar menggunakan isu ini dalam *power-sharing*. Di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Irian Jaya yang secara nyata menunjukkan betapa ampuhnya isu ini digunakan oleh aktor-aktor politik, ketika berhadapan dengan entitas politik lain (Haboddin, [2012](#)).

Selain itu, kelompok yang berusaha merebut pengaruh Islam Sosial pada saat itu ialah Forum Pembela Islam (FPI). FPI didirikan 17 Agustus 1998 di Pesantren Al-Umm, Ciputat, Tangerang, diprakarsai oleh beberapa habib dan kyai (Anwar, [1995](#)). Disebutkan bahwa FPI didirikan dengan alasan umat Islam telah lama menjadi korban penindasan, seperti yang berlaku di Aceh, Lampung, Tanjung Priok, Haur Koneng, dan Sampang, tetapi tidak terungkap dan tidak mendapat keadilan. FPI bukan lahir dari madrasah radikal atau ide-ide kekhalifahan, tetapi lahir dari aparat negara yang sekuler. Mereka digalang dan dilatih oleh militer untuk menghalau para pemrotes pemerintah. FPI terang-terangan anti demokrasi dan memandang bahwa keterbukaan politik akan mengubah rakyat Indonesia menjadi kafir.

Tidak jarang mereka melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan aparat penegak hukum dan tindakan tersebut seolah dibiarkan oleh aparat. Adanya perlindungan dan kepentingan pemerintah saat itu kepada FPI membuat mereka berhasil mengukuhkan kedudukannya dalam dunia perpolitikan dengan sengaja menciptakan ketegangan sosial dan kepanikan moral. Bagi FPI, segala tindakan itu dinilai sebagai bagian dari prinsip nahi munkar (mencegah kemungkaran). Nyatanya, mereka yang ingin menegakkan nahi munkar malah bertindak seenaknya.

Selanjutnya, ada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dengan jelas menyebarkan pandangan intoleran dan membenarkan kaum ekstremis untuk berbuat diskriminasi, semisal dengan menampakkan permusuhan yang nyata kepada kaum non-muslim. HTI merupakan gerakan politik transnasional yang digagas oleh Taqiyuddin al Nabhani, sempalan dari Ikhwan. Tujuan akhir perjuangan politik mereka adalah terciptanya sebuah kekhalifahan yang meliputi seluruh dunia Islam di bawah satu payung politik (Anwar, [1995](#)). Mereka beranggapan bahwa kekhalifahan merupakan satu-satunya sistem politik sesuai dengan syariah. Padahal dari literatur-literatur yang ada, disebutkan bahwa sistem demokrasi sistem yang menarik. Salah satu contohnya adalah karya Khalid Muhammad Khalid, *al-Dimuqratiyah*. Demokrasi dipandang sebagai sistem pemerintahan yang ditegakkan di atas dua prinsip: pemerintahan partisipatif (*participatory politics*) dan hak-hak asasi manusia (Buehler, [2009](#); Paralihan, [2019](#)).

Selain itu, demokrasi dapat juga dipandang sebagai sistem yang mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan bernegara. Hal tersebut dapat dilihat dari banyak ayat Alquran dan Hadits yang memerintahkan untuk bermusyawarah. “Dan urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka” (QS. 42: 38), disebut sebagai ciri masyarakat mukmin. “Bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan”, adalah perintah kepada Nabi Muhammad. Dalam Hadits Nabi bersabda: “Tidak akan gagal orang yang bermusyawarah”.

Mengutip pendapat lain dijelaskan bahwa sebenarnya Islam dan Demokrasi tidak ada pertentangan, Huwaidi menyebut hal tersebut bisa dilihat dari tujuh ciri-ciri negara menurut Islam, pertama, kekuasaan di pegang penuh oleh umat, kedua, masyarakat ikut berperan dan bertanggung jawab, ketiga, kebebasan adalah hak bagi semua orang, keempat, persamaan di antara semua manusia, kelima, kelompok yang berbeda juga memiliki legalitas, keenam, kezaliman mutlak tidak diperbolehkan dan usaha meluruskan adalah wajib, ketujuh, undang-undang di atas segalanya. Ketika negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam melepaskan diri dari penjajahan, mereka memilih sistem demokrasi ini (Huwaidi, [1996](#)).

Akan tetapi, FPI dan HTI saat ini telah resmi dibubarkan oleh pemerintah Republik Indonesia. HTI lebih dulu dibubarkan pada 19 Juli 2017 melalui Kementerian Hukum dan HAM secara resmi mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Tiga tahun berselang, tepatnya 30 Desember 2020 FPI resmi dibubarkan dan dilarang di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. Surat tersebut ditandatangani oleh, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate. Kemudian, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar.

Dibalik semua itu, ada dua pilar utama yang mampu menghalau kecenderungan ekstremis dalam ruang publik Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Selain itu, ada juga partai-partai yang berbasis Islam semisal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Namun, paradoks yang terjadi pada partai Islam ini adalah kegagalan mereka dalam pemilu, di tengah antusiasme publik akan peran agama yang lebih besar dalam kehidupan publik. Berdasarkan hasil pemilu dalam kurun waktu 2014-2019, urutan tiga besar pemenang pemilu didominasi oleh partai-partai nasionalis, semacam PDIP, Gerindra, dan Golkar.

Kekalahan yang terjadi pada partai-partai berbasis Islam dijelaskan oleh pengamat karena lemahnya kinerja mereka. Kelemahan tersebut dapat dilihat dari lemahnya mesin partai dari tingkat bawah hingga atas dan juga kurangnya tokoh-tokoh yang menjual dari partai tersebut. Selain itu, kemenangan yang didapatkan oleh partai nasionalis maupun nasionalis-religius ialah cepatnya partai-partai tersebut merespons dengan menggunakan simbol maupun jargon Islam (Woischnik & Müller, 2013). Bagi sebagian masyarakat Islam yang tidak terlalu mencampuri urusan politik dengan agama tentu lebih tertarik memilih partai-partai nasionalis-religius. Alasannya sederhana, karena partai-partai tersebut membawa kepentingan yang lebih besar manfaatnya bagi kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Peristiwa politik identitas agama yang telah terjadi di Indonesia dapat kita lihat pada saat pemilu 2014 ketika satu pihak mengklaim dirinya di dukung oleh umat Islam secara keseluruhan. Selanjutnya, satu pihak lain juga mengklaim mendapat dukungan dari umat Islam dan para ulama, serta pemuka agama lain. Tidak sampai di situ, pola ini pun berlanjut pada Pilkada DKI 2017 yang tidak hanya memainkan politik identitas agama, tetapi memainkan juga isu suku dan ras. Peristiwa ini diawali, ketika calon petahana saat kunjungan di Kepulauan Seribu melakukan penistaan agama dengan menyebutkan “masyarakat dibohongi pakai Al-Maidah; 51” (Tangkas, Ngenget, & Musthofa, 2021). Hal itu berakibat terjadi aksi bela Alquran oleh Massa 212 pada 02 Desember 2012 di Monas. Berdasarkan pada peristiwa di atas muncul isu adanya perbedaan agama dan etnis. Islam dan non-Islam, Cina dan bukan Cina, mayoritas dan minoritas, hingga sampai muncul gerakan politik yang mengusung *tagline* “Asal bukan Ahok” atau “Asal Jangan Ahok”, dan juga “Aku Islam, Aku Pilih Anies” (Fautanu, Buhori, & Gunawan, 2020).

Politik identitas sebetulnya dapat membangun kekuatan politik Islam, dan ukhuwah Islamiyah sebagai bagian dari proses politik tersebut. Adanya politik identitas menjadi modal dan kekuatan untuk memenangkan kontestasi politik (pasangan calon pemimpin tertentu), hal ini dibuktikan dengan terpilihnya pasangan Anies-Sandi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, karena didukung dengan adanya kekuatan Islam politik maupun politik Islam. Oleh karena itu, hal yang telah disampaikan di atas menjadikan banyak kalangan menganggap Pilkada DKI Jakarta 2017 menggunakan politik identitas yang cukup kental, kuat, mendasar dan berdampak pada kehidupan sosial politik keagamaan.

Seakan tidak ada habisnya, politik identitas agama kembali menjadi alat bagi politikus saat pemilu 2019. Saat itu, calon presiden petahana Jokowi memilih K.H. Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden (Mujab & Irfansyah, [2020](#)). Jokowi menjelaskan dipilihnya Ma'ruf sebagai cawapres, karena ia merupakan tokoh agama yang bijaksana, pernah menjadi anggota legislatif DPRD, DPR, MPR, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rais 'Aam PBNU dan Ketua Umum MUI. Dalam kaitannya dengan kebhinekaan, Jokowi menegaskan Ma'ruf menjabat anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Kuwado, Farisa, & Gatra, [2018](#)). Hal tersebut, dapat kita amati juga sebagai salah satu strategi Jokowi untuk dapat mendulang suara umat Islam, karena Ma'ruf direpresentasikan mewakili Ulama dan kader NU.

Di sisi lain, akibat adanya peristiwa penistaan agama tahun 2017 oleh Ahok para pendukung gerakan 212 kemudian membentuk sebuah gerakan yang dikenal dengan nama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Ulama (GNPF-U). Saat itu, "Ijtima Ulama I" yang dilangsungkan pada tanggal 27-29 Juli 2018, menjatuhkan pilihan dan memberikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019-2022, untuk bertarung melawan calon presiden petahana Joko Widodo. Selanjutnya, GNPF-Ulama menggelar "Ijtima Ulama II" pada 16 September 2018, untuk memutuskan dukungan politik kepada pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno. Ijtima Ulama II juga mendorong untuk dibentuknya sebuah koalisi yang dinamakan sebagai Koalisi Keumatan.

Sangat jelas, dari dua peristiwa dalam Pilpres 2019 tersebut dapat dilihat bahwa masing-masing pihak memanfaatkan dengan maksimal isu agama yang menyebabkan terjadinya pembelahan masyarakat. Ada yang berbeda pilihan akhirnya bermusuhan dan saling ejek. Sampai-sampai muncul istilah "cebong" dan "kampret/kadrun". Sungguh ironis peristiwa yang terjadi saat itu. Akan tetapi, kita dapat melihat bahwa peristiwa-peristiwa di atas merupakan bukti nyata yang menjadikan politik identitas sangat penting dan masih diminati serta menjadi senjata yang digunakan oleh para elit politik sampai saat ini untuk memuluskan langkahnya mendapatkan kekuasaan.

Tidak lama lagi, tepatnya tahun 2024 Indonesia akan kembali melaksanakan pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029, kelihatannya isu-isu politik identitas ini masih ingin dimainkan oleh segelintir wirausahawan politik. Baru-baru ini muatan bernada "politik identitas" di salah satu stasiun televisi tampil dalam sebuah tayangan azan salah satu yang digadag-gadag menjadi calon presiden 2024. Tayangan tersebut sontak menjadi pembicaraan dan pengamatan bagi para pengamat politik, ada yang menyebut hal itu termasuk kategori politik identitas. Namun, ada juga yang menyebutnya hal tersebut bukan bagian dari politik identitas.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang dipandang mewakili umat Islam juga memberikan pandangan terkait tayangan tersebut, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Anwar Abbas menilai munculnya bakal calon presiden Ganjar Pranowo dalam tayangan azan di salah satu stasiun televisi merupakan hal yang sangat bagus. Dari peristiwa tersebut semoga para elite politik dan masyarakat semakin cerdas untuk menggunakan hak politiknya dan tak terjebak kembali kepada narasi politik identitas. Jangan sampai akibat hal tersebut keutuhan dan kesatuan bangsa kembali menjadi taruhannya seperti yang sudah-sudah.

Hal yang dapat kita syukuri saat ini ialah berkat maraknya informasi dan pencerdasan yang dilakukan oleh para akademisi di Indonesia masyarakat mulai jenuh terhadap situasi politik identitas agama yang terus dimainkan oleh wirausahawan politik ini. Hal yang demikian disebut George sebagai bentuk kegagalan politik di Indonesia. Ia menuliskan terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kegagalan politik di Indonesia, yaitu keinginan kaum konservatif mengubah Indonesia menjadi negara Islam, hal tersebut berkaitan dengan keinginan HTI menjadikan Indonesia sebagai negara Kekhilafahan Islam. Kemudian, adanya mengambinghitamkan terhadap kelompok yang dirasa menyimpang (misalnya, Ahmadiyah dan Syiah). Dalam kasus ini kita tahu bahwa adanya

golongan Ahmadiyah dan Syiah di Islam Indonesia menyebabkan umat Islam terpecah belah. Padahal kalau saja mereka diberikan kebebasan dengan mengacu pada Undang-Undang selagi mereka tidak membuat kegaduhan maka mereka diperkenankan melaksanakan ajarannya. Jikalau golongan itu dianggap menyimpang, maka para ulama memberikan arahan dan mengajak mereka untuk kembali pada ajaran yang benar. Terakhir, yang menyebabkan beratnya tantangan demokrasi Indonesia dan kegagalan politik itu ialah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kekuasaan politik yang diakibatkan oleh perilaku elite politik itu sendiri.

SIMPULAN

Politik identitas menjadi suatu ancaman bagi sebuah negara apabila tidak berhati-hati dalam pelaksanaannya. Politik identitas ini muncul pertama kali di Amerika sekitar tahun 1970an, di Indonesia sendiri hal-hal yang serupa politik identitas telah terjadi pada masa Orde Baru. Akan tetapi, istilah itu familiar ditelinga masyarakat dalam 10 tahun terakhir, terlebih ketika pemilu 2014, Pilkada DKI 2017, dan pemilu 2019. Pada dasarnya politik identitas dapat berdampak baik, apabila dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan umum. Namun, yang terjadi di Indonesia politik identitas dimanfaatkan hanya untuk kepentingan pribadi dan segelintir kelompok. Inilah yang dapat menyebabkan instabilitas politik dan disintegrasi bangsa. Selain itu, politik identitas juga dapat menyebabkan tertutupnya perdebatan program kerja berkualitas dan unggulan. Hal ini sangat tidak diharapkan terjadi kembali pada pemilu 2024 yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Diharapkan para politikus mampu mengarahkan mesinnya untuk melakukan pencerdasan politik melalui adu gagasan program kerja, sehingga pemilu ke depan dapat berjalan baik dan menghasilkan kepemimpinan yang mampu membawa Indonesia lebih maju dan mewujudkan visi Indonesia emas 2045.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syalir Media Press.
- Anwar, M. S. (1995). *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.
- Ardini, M. K. R. (2021). Fenomena Intoleransi Antar Umat Beragama Serta Peran Sosial Media Akun Instagram Jaringan Gusdurian Indonesia Dalam Menyampaikan Pesan Toleransi. *Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(2), 103–132. <https://doi.org/10.54150/syiar.vii2.41>
- Buehler, M. (2009). Islam and Democracy in Indonesia. *Insight Turkey*, 11(4), 51–63.
- Fatianda, S. (2023). Politik Islam di Afghanistan: Studi Terhadap Kekuasaan Kelompok Taliban. *Local History & Heritage*, 3(1), 12–19. <https://doi.org/10.57251/lhh.v3i1.907>
- Fautanu, I., Buhori, M., & Gunawan, H. (2020). Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 87–112. <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.8146>
- Firdaus, M. N., & Andriyani, L. (2021). Politik Atas Identitas Agama, dan Etnis di Indonesia. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 2(2). <https://doi.org/10.24853/independen.2.2.47-52>
- George, C. (2017). *Pelintiran Kebencian: Rekayasa Ketersinggungan Agama dan Ancamannya bagi Demokrasi* (I. A. Fauzi & I. Rafsadie, Eds.). Jakarta: PUSAD Paramadina & IIS UGM.
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal. *Journal of Government and Politics*, 3(1), 109–126. <https://doi.org/10.18196/jgp.2012.0007>
- Hanan, D. (2020). Identity Politics in the 2019 Indonesian General Elections: its Significance and Limitation. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24198/jwp.v5i1.27710>
- Heller, A. (2001a). A Tentative Answer to the Question: Has Civil Society Cultural Memory? *Social Research*, 68(4), 1031–1040.
- Heller, A. (2001b). *Cultural Memory, Identity and Civil Society*. Berlin: International Politics and Society.
- Herlina, L. (2018). Disintegrasi Sosial dalam Konten Media Sosial Facebook. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 1(2), 232–258. <https://doi.org/10.15575/jt.vii2.3046>
- Huwaiddi, F. (1996). *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani*. Bandung: Mizan.

- Kuwado, F. J., Farisa, F. C., & Gatra, S. (2018, August 9). Ini Alasan Jokowi Pilih Ma'ruf Amin Jadi Cawapresnya.
- Lawrence, J. (2009). Money, Men, and Mayhem: Electoral Politics before the First World War. In *Electing Our Masters* (pp. 71–95). Oxford: Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199550128.003.0004>
- Ma'arif, A. S. (2012). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy Project.
- Muhajir, A., & Wulandari, F. (2023). Demokrasi Oligarkis dan Resesi Demokrasi di Indonesia Pasca-Suharto: Sebuah Tinjauan Sejarah Politik. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 4(1), 1–10.
<https://doi.org/10.34007/warisan.v4i1.1876>
- Mujab, S., & Irfansyah, A. (2020). Komunikasi Politik Identitas K.H. Ma'ruf Amin sebagai Strategi Depolarisasi Agama pada Kontestasi Demokrasi Pilpres 2019. *Warta ISKI*, 3(1), 54–66.
<https://doi.org/10.25008/wartaiski.v3i01.46>
- Paralihan, H. (2019). Islam dan Demokrasi. *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, 10(1).
<https://doi.org/10.32678/aqlania.v10i01.2109>
- Rahman, M. T. (2020). *Agama dan Politik Identitas dalam Kerangka Sosial*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung Press.
- Siswanto. (2019). Pancasila Sebagai Pengawal Solidaritas Kebangsaan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(1), 109–116. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i1.502>
- Tangkas, S. A., Ngenget, I., & Musthofa. (2021). Gerakan Politik GNPf-Ulama dalam Pemilihan Umum Presiden 2019. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(1), 114–130. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i1.113>
- Tayob, A. (2002). Religion, Culture and Identity in a Democratic Society. *Journal for the Study of Religion*, 15(2), 5–13.
- Ufie, A. (2014). Mengintegrasikan Nilai-Nilai Multikulturalisme Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(2).
- Wingarta, I. P. S., Helmy, B., Hartono, D., Mertadana, I. W., & Wicaksono, R. (2022). Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), 117–124.
<https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.256>
- Woischnik, J., & Müller, P. (2013). *Islamic Parties and Democracy in Indonesia: Insights from The World's Largest Muslim Country*. Ohio.
- Yunus, F. M. (2014). Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(2), 217–228. <https://doi.org/10.22373/SUBSTANTIA.V16I2.4930>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.